

**ASPEK HUKUM PENGATURAN DAN KEABSAHAN JUAL BELI SENJATA
API SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN HAK KEPEMILIKAN DAN
PENGUNAAN SECARA INDIVIDU DI INDONESIA**

Irvan Aktivan Agustine

1487081

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, teknologi khususnya internet saat ini sudah semakin berkembang dan menjadi salah satu media yang digunakan untuk berbagai keperluan, contohnya *Electronic Commerce (E-Commerce)*. *E-commerce* atau yang dikenal sebagai perdagangan elektronik merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Salah satu jual beli dengan menggunakan sarana *e-commerce* adalah senjata api. Saat ini penjualan senjata api tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi sudah berkembang dengan menggunakan media internet secara daring untuk kepemilikan dan penggunaan secara individu. Maka dari itu, perlu pengkajian terhadap pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia yang dikaitkan dengan hak kepemilikan secara individu dan keabsahan perjanjian jual beli senjata api secara daring.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yaitu Buku III KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 12/DRT/1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik TNI atau POLRI Untuk Kepentingan Olahraga, bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta penelitian ini menggunakan data primer sebagai pelengkap penelitian berupa wawancara kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan memahami pengaturan hukum tentang jual beli senjata api di Indonesia dikaitkan dengan hak kepemilikan secara individu serta mengkaji dan memahami keabsahan perjanjian jual beli senjata api secara daring dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegiatan jual beli senjata api di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan izin pembelian dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor), izin pemilikan, dan izin penggunaan untuk kepentingan bela diri atau olahraga. Perjanjian jual beli senjata api secara daring adalah sah jika didasari izin-izin tertentu, namun perjanjian tersebut menjadi tidak sah apabila dilaksanakan tanpa perizinan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya pihak kepolisian melakukan penyuluhan agar masyarakat tidak mudah melakukan transaksi jual beli senjata api, rutin melakukan razia, dan pemerintah harus segera merevisi peraturan perundang-undangan tentang jual beli senjata api agar tidak menimbulkan kekeliruan terutama dalam hal jual beli senjata api secara daring.

Kata Kunci : Jual Beli, Senjata Api, Daring, Hak Kepemilikan.

***Legal Aspects Regulations and the Validity of Online Trading Firearms Agreements
Associated with Individually Ownership and the Use In Indonesia***

Irvan Aktivan Augustine

1487081

ABSTRACT

As time goes on, technology and the internet is already growing and became one of the media that is used for various purposes, for example the electronic commerce (E-Commerce). E-commerce is distribution, purchase, sale, of goods and services electronically. One of them is the firearm sales. The sale of the firearm is no longer done conventionally, but has developed using internet media online. Therefore, it is necessary for the assessment against the legal arrangements regarding the sale and purchase of firearms in Indonesia, that is associated with the individual ownership rights and the legality of the firearm purchase agreement online.

This research uses normative juridical method by using legal and conceptual approach. The data used by the author are secondary data which consist of primary legal materials namely Book Number III Of Civil Law, Act No. 11 Of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions, Act No. 12 Of 1951 concerning Firearms, Act No. 8 Of 1948 Concerning Registration and Granting of Use Firearms License, Supervision and Control of Arms of Military Standards Outside the Ministry of Defense and National Army, Regulation of the National Police Chief No. 18 of 2015 on the Terms of Licensing, Supervision and Control of Non-organic Firearms Indonesia National Police/ Indonesia National Army For Self-Defense Interest, Regulation of the National Police Chief No. 13 of 2006 on the Terms of Supervision and Control of Non-organic Armed Forces of National Police and Army For Sports Interest, secondary legal materials are literature studies, and tertiary legal materials in the form of law dictionaries. as well as this research using primary data as a complement of research in the form of interviews to the West Java regional police. The purpose of this research is to examine and understand the legal arrangements regarding the sale and purchase of firearms in Indonesia linked to proprietary rights individually as well as examine and understand the validity of firearm purchase agreement between citizens of Indonesia with foreign parties online.

The result of the research shows that the activities of buying and selling firearms in Indonesia must be carried out with the permission of purchasing from domestic and from abroad (imports), ownership permission, permission to use for the benefit of martial arts or sports. the firearm purchase agreement online is valid if it is based on certain permits but the agreement becomes invalid if it is carried out without permission from the Indonesian National Police. Based on the research, the police should be doing outreach the society so they are not easy to do the buying and selling firearms, routinely conduct raids, and the Government should immediately revise the regulations about the sale and purchase of firearms, especially in terms of buying and selling firearms online.

Keywords : trading, firearm, online, the ownership.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	10
E. Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konseptual	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Jenis Data	21

5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Metode Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan	25
 BAB II PERJANJIAN DAN TRANSAKSI DARING DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	
A. Perjanjian pada Umumnya	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Asas-asas Perjanjian	28
3. Syarat Sahnya Perjanjian	31
4. Hapusnya Suatu Perjanjian	40
B. Transaksi Elektronik dan Pengaturannya di Indonesia	41
1. Pengertian Transaksi Elektronik	41
2. Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia	46
 BAB III PENGATURAN SENJATA API DI INDONESIA	
A. Senjata Api pada Umumnya	49
1. Pengertian Senjata Api	49
2. Jenis-jenis Senjata Api	51
B. Regulasi Senjata Api di Indonesia	55
1. Regulasi Senjata Api secara Umum	55
2. Regulasi tentang Pembelian Senjata Api	59
3. Regulasi Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api	61
C. Prosedur Pembelian, Pemilikan, dan Penggunaan Senjata Api	64
1. Subjek Pembelian, Pemilikan, dan Penggunaan Senjata Api	64
2. Perizinan Pembelian, Pemilikan, dan Penggunaan Senjata Api	67

**BAB IV ASPEK HUKUM PENGATURAN DAN KEABSAHAN
JUAL BELI SENJATA API DIKAITKAN DENGAN
HAK KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SECARA
INDIVIDU DI INDONESIA**

- A. Analisa Terhadap Pengaturan Hukum tentang Jual Beli
Senjata Api di Indonesia dikaitkan dengan Hak
Kepemilikan dan Penggunaan Secara Individu 76**
- B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Senjata Api secara
Daring Dalam Sistem Hukum Indonesia 90**

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan 104**
- B. Saran 106**

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE